

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan, yakni:

1. Bahwa Pelaksanaan Pasal 3 Peraturan Gubernur Gorontalo No 73 tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus Di Kota Gorontalo belum dapat dikatakan efektif karena kurangnya kesadaran dan sosialisasi terhadap pengendara maupun masyarakat dan kurang peluasan jalan khusus untuk pelintasan mobil kontener, sehingga pemerintah perlu menegaskan kembali peraturan gubernur dan lebih efektif dalam melakukan operasional Kendaraan Konteiner. Karena jumlah dari Kendaraan Kontener yaitu berjumlah 37.509 mobil kontener yang beroperasi di Kota Gorontalo sehingga Perlu adanya penegasan kembali peraturan gubernur ini agar supaya dapat mencegah kemacetan atau pun tingkat kecelakaan di Kota .
2. Faktor yang menghambat dan mempengaruhi penegakan Peraturan Gubernur Gorontalo No 73 Tahun 2017 terkait dengan jam, kerja kendaraan transportasi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan Peraturan Gubernur Gorontalo No 73 Tahun 2017, penulis akan mengaitkannya dengan teori yang di kemukakan oleh Lawrence

Meir Friedman bahwa dalam mengukur pelaksanaan di ukur dari tiga indikator sebagai berikut, Subtansi Hukum, Stuktur Hukum, serta Budaya Hukum/Kultur.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian dan kesimpulan di atas, maka peneliti menguraikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Agar lebih efektif dalam pelaksanaan Pasal 3 Peraturan Gubernur Gorontalo No 73 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan angkutan barang khusus di Kota Gorontalo pemerintah perlu menegaskan dan meberikan sanksi denda terhadap pelanggar oprasional jam kerja kontener agar dapat mencegah kemacetan atau pun tingkat kecelakaan Kota di Gorontalo
2. Pemerintah Kota Gorontalo lebih perlu memperhatikan fasiltas dan mengsosialisasi kan persaturan gubernur, pemeritah juga perlu menabab anggota dinas pehubungan dalam bidang lalu lintas kendaraan darat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Wantu, Fence M. 2011, *Idee Des Recht, Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasi Dalam Proses peradilan Perdata)* Pustaka Pelajar, Yogyakarta,
- Puluhulawa, Fenty U. 2011. *pertambangan mineral dan batubara dalam perspektif hukum*, Yogyakarta: Interpena
- Martono, H.K. dan Tjahjono, Budi Eka. 2011. *transportasi di perairan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Widjaja, Haw. 2014. *otonomi desa merupakan otonomi yang asli,bulat dan utuh*, Jakarta: PT Raja Grafindo persada
- Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto. 2013. *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif & empiris)*, Yogyakarta :Pustaka Pelajar
- Sarman dan Makarao, Taufik Mohammad. 2011. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta
- Soekanto, Soerjono. 2013, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit. PT. RajaGrafindo Persada Jakarta.

JURNAL/SKRIPSI

- Hamid, Abdul. 2011, “*Otonomi Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik*” Jurnal *Academica Fisip Untad* Vol.03
- Rozikin, Ahmad. 2014, Skripsi“ *Efektivitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Yang Berkaitan Dengan Penggunaan Helm Standar Di Kabupaten Enrekang*”, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin,
- Utami, Nurl Fauziah Andy. “*Analisis Hukum Kedudukan Tap Mpr Ri Dalam Hierarki Perundangan*”, (skripsi), program studi ilmu hukum fakultas Hukum Universitas Hasanudin, Makasar 2013
- Hanapi, Aris. 2015, Skripsi: “*Efektivitas Fungsi Polisi Lalu Lintas dalam Mengurangi Angka Pelanggaran Lalu Lintas yang di Sebabkan oleh Kendaraan Bentor(Studi Kasus Polres Gorontalo Kota)*”, Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo,

- Nugraha, Caesar. 2014 “*Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Di Kabupaten Wajo* “ (Skripsi), Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makassar,
- Putri, Octaviana Dea. 2015 “*Pelaksanaan Program Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Oleh Dinas Sosial Kota Bandar Lampung*”,(Skripsi), (Bagian Hukum Administrasi Negara,Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung)
- Idris, Ayub Felki. *Eksistensi Kendaraan Becak Bermotor (bentor) di Kota Gorontalo (suatu tinjauan Yuridis dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)*, (skripsi), (Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Malang 2011)
- Muljanto, Heru. 2008, “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Pelaksanaan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Standar Prosedur Operasi Pengaturan Dan Pelayanan (Spopp) Di Kantor Pertanahan Kota Surakarta*”,(Tesis), Program Studi Pasca Sarjan Universitas Sebelas Maret
- Saputra, Irfan. *Efektifitas pengawasan angkutan barang*, (skripsi), (Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, Bandar Lampung 2017)
- Toiti, Karim R., ”(*Implementasi pasal 16 peraturan daerah provisi gorontalo no 1 tahun 2008 mengenai ijin usaha perikanan provinsi gorontalo*)”, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo,Tahun 2015
- Kementerian Perhubungan Direktur Jenderal Perhubungan Darat (*pelayanan publik di sektor perhubungan darat*)
- Ahmad, Alifyan Muh. “*Tinjauan Yuridis Terhadap Pembentukan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar*”, (skripsi) bagian hukum tata negara fakultas hukum universitas hasanudin, makasar 2016
- Eldarini, Maudyna Nadia Maudyna. 2017 “*Kinerja Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Dalam Mengatasi Kemacetan*”, (Skripsi), (Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung 2017)
- Pratanto, *Dampak Pembangunan Terminal Kargo Terhadap Sistem Transportasi Angkutan Barang Industri Besar Di Kota Kudus*, (tesis), (Pascasarjana Magister Pembangunan Wilayah Dan Kota Universitas Diponegoro, Semarang 2006)
- Suriyanti, Sri. *Prosedur Penyilangan Koleksi Di Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Universitas Negeri Makassar* (skripsi) Fakultas Adab Dan Humaniora Uin Alauddin Makassar. Makassar 2017

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 73 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus

Undang-undang Negara republik Indonesia tahun 1945, Jl. Kramatraya 57 Jakarta pusat,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

SUMBER DATA

Sumber data dilakukan di Dinas Perhubungan Kota Gorontalo

Wawancara dengan bapak Emus pada tanggal 29 juli 2018 jam 11.30

Wawancara dengan Direktur Utama PT Pelindo IV, Doso Agung Hari/Tanggal Rabu 13 November 2018 Pukul 13.43 Wita

Sumber data dilakukan di Depo Pelabuhan Kota Gorontalo

Wawancara dengan pengelolah Depo Pelabuhan Kota Gorontalo bapak Aldi pada tanggal 29 juli 2018 jam 13.30